



**RANCANGAN AKHIR  
PERUBAHAN RENJA  
TAHUN 2025**

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena dengan limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penyusunan dan penulisan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dapat dirampungkan.

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar sebagai dasar dan acuan adalah *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017* tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas sekaligus sebagai instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan dan capaian kinerja dari kinerja pada triwulan I tahun 2025. Disamping itu Renja juga menjadi acuan untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS Perubahan dan Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) Perubahan tahun 2025, dimana penyusunan program dan kegiatannya didasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam penyusunan dan penulisan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar ini, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Semoga berbagai usaha yang dilakukan untuk menjadikan Kabupaten Tanah Datar terbebas dari permasalahan sosial dapat diwujudkan.

Batusangkar, Juni 2025

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN TANAH DATAR

**HELDIYAS, SH**  
NIP. 19671202 198901 1 004

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA–OPD), adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rancangan Akhir Perubahan Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
2. Rancangan Akhir Perubahan Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS Perubahan dan Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan tahun 2025.
3. Rancangan Akhir Perubahan Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada triwulan I Tahun 2025.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja ini berdasarkan *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun tahun 2017* tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu OPD teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Sosial PPPA dibentuk Tim Penyusunan Renja yang terdiri dari Kepala Dinas sebagai Ketua Tim, Sekretaris Dinas sebagai Wakil Ketua, Perencana Ahli Muda sebagai Sekretaris dan Kabid-Kabid serta seluruh fungsional dan

pelaksana pada Sekretariat. Tim bertanggungjawab kepada Kepala Dinas PPPA dalam penyusunan, pembahasan dan penyempurnaan Renja Dinas Sosial PPPA.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Kualifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
25. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 1999 Nomor 6 Seri D).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) ini adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan program/ kegiatan dan sebagai bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan program/ kegiatan tahun 2025 serta perencanaan program /kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025.

Sedangkan tujuan disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) adalah untuk memasukkan program/ kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan tahun 2025.

### **I.4. Sistematika Penulisan**

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenan.
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB V	Penutup

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN**

#### 2.1. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial PPPA dan capaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan triwulan I tahun berjalan 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah :





		<b>DASAR.</b>																																						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL.			1 0 0	73.2 60.2 81.0 00	5 0	36.7 08.0 82.0 00															1 0 0	20.6 17.0 93.7 54	3 5	5.25 8.97 6.09 0							3 5	5.25 8.97 6.09 0	4 4	41.96 7.058 .090	4 4	3 5		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1 0 0	12.3 58.4 55.0 00	8 5	7.90 4.17 9.00 0															1 0 0	4.78 2.09 9.34 6	2 3 3 2	1.11 5.41 1.69 0								2 3 3 2	1.11 5.41 1.69 0	2 7	9.019 .590. 690	2 7	2 3 3 2	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 0 0	14.9 94.0 00	6 1	12.3 98.0 00															1 0 0	30.0 00.0 00	0 0 0	-							0 0 0	-	3 0	12.39 8.000	3 0	0 0 0		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	2	D ok	1 0 0	4.99 5.00 0	9 9	4.52 6.00 0														1 0 0	20.0 00.0 00	0 0 0	-							0 0 0	-	5 0	4.526 .000	5 0	0 0 0	Dinos	



		<b>Administ rasi Keuanga n Perangk at Daerah</b>			1 0 0	11.0 59.0 93.0 00	9 8 7.20 1.03 1.00 0									1 0 0	4.19 4.24 2.56 8	2 6 3 3	1.10 4.52 9.49 0						2 6 3 3	1.10 4.52 9.49 0	5 6	8.305 .560. 490	5 6	2 6 3 3	
		Penyedia an Gaji dan Tunjanga n ASN	Jumlah Orang yang Meneri ma Gaji dan Tunjan gan ASN	1 4	Bl n	1 0 0	11.0 48.7 44.0 00	9 7 7.19 2.07 0.00 0								1 0 0	4.18 9.24 2.56 8	2 6 3 7	1.10 4.52 9.49 0						2 6 3 7	1.10 4.52 9.49 0	6 2	8.296 .599. 490	6 2	2 6 3 7	Dins os
		Koordina si dan Penyusu nan Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lapora n Keuan gan Akhir Tahun SKPD dan Lapora n Hasil Koordi nasi Penyus unan Lapora	2	D ok	1 0 0	10.3 49.0 00	9 9 8.96 1.00 0								1 0 0	5.00 0.00 0	0 0 0	-						0 0 0	-	5 0	8.961 .000	5 0	0 0 0	Dins os











	kualitas pelayanan	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			000	000										000	0	0					0	0		0,00		0			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	10	559.491.000	97	302.274.000								10	105.000.000	3,45	3.627.400						3,45	3.627.400	50	305.901.400	50	3,45	Dinsos
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	7 unit	10	15.000.00	10	10.523.00								10	15.000.00	0,00	-						0,00	-	50	10.523.000	50	0,00	Dinsos





	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	sosial pada PMKS dan PSKS																									
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Terfasilitasinya kegiatan LK3 dan terlaksananya penyuluhan sosial pada PMKS dan PSKS	160	or g	10	51.497.00	68	26.074.00						100	10.000	00	-				00	-	34	26.074.000	34	00	Dinsos
	<b>PROGRAM REHABI</b>		100		10	56.613.6	13	26.417.0						100	14.942.5	27	4.058.22				27	4.058.22	47	30.475.268	47	27	

		LITASI SOSIAL			72.000	41.000									20.908	16	7.400					16	7.400	.400,00	16		
	Peni ngka tan laya nan pend uduk misk in dan peny anda ng kese jahte raan sosi al	<b>Rehabilit asi Sosial Dasar Penyand ang Disabilit as Terlantar , Anak Terlantar , Lanjut Usia Terlantar , serta Gelanda ngan Pengemi s di Luar Panti Sosial</b>			100	180	4.578	2.790							100	100	1.040	-				000	-	45	2.795.801.000	450	
	Penyedia an Permaka nan	Jumlah Orang yang Menda patkan Pemen uhan Kebutu han Perma	75	na ga ri	100	88	2.459.070	1.848.000							100	000	746.000	-				000	-	44	1.848.000.000	440	Dins os









					1 0	2.36 7.94 6.00 0	9 6	1.41 5.44 8.00 0													1 0	626. 473. 500	1 3 6 2	85.3 37.0 00								1 3 6 2	85.3 37.0 00	5 1	1.500 .785. 000	9 5	1 3 6 2	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1 ke 4 c	1 0	118. 050. 000	9 3	81.2 96.0 00														1 0	4.60 0.00 0	0 0 0	-								0 0 0	-	4 6	81.29 6.000	4 6	0 0 0	Dinsos
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluar ga yang Mendapatkan pengan tasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1 % 0 0	1 0	1.42 4.94 8.00 0	9 9	925. 569. 000														1 0	558. 166. 400	1 5 2 9	85.3 37.0 00								1 5 2 9	85.3 37.0 00	5 7	1.010 .906. 000	5 7	1 5 2 9	Dinsos

		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Jumlah Keluar ga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota	1 0 0	% 0 0	1 0 0	824. 948. 000	9 9 000	408. 583. 000												1 0 0	63.7 07.1 00	0 0 0	- 0 0							0 0 0	- 0 0	4 9 0	408.5 83.00 0	4 9 0	0 0 0	Dinsos
		<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>				1 0 0	832. 057. 000	9 8 000	417. 673. 000												1 0 0	114. 000. 000	0 0 0	- 0 0							0 0 0	- 0 0	4 9 0	417.6 73.00 0	4 9 0	0 0 0	
	Peningkatan layanan	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana</b>				1 0 0	832. 057. 000	9 8 000	417. 673. 000												1 0 0	114. 000. 000	0 0 0	- 0 0							0 0 0	- 0 0	4 9 0	417.6 73.00 0	4 9 0	0 0 0	



	kuali tas pela yana n	<b>Makam Pahlawa n Nasional Kabupat en/Kota</b>				000		000														0			0			0	
		Pemeliha raan Taman Makam Pahlawa n Nasional Kabupate n/Kota	Jumlah Makam yang Terpen uhi Pemeli haraan nya pada Taman Makam Pahlaw an Kabup aten/K ota	2 T M P	1 0 0	199. 954. 000	9 5	124. 488. 000							1 0 0	30.0 00.0 00	0 0 0	-					0 0 0	-	4 7	124.4 88.00 0	4 7	0 0 0	Dins os
		<b>PROGRA M PENGAR USUTAM AAN GENDER DAN PEMBER DAYAAN PEREMP UAN</b>			1 0 0	1.84 6.46 0.00 0	9 9	1.10 6.59 8.00 0							1 0 0	469. 000. 000	0 0 0	-					0 0 0	-	4 9	747.4 26.00 0	4 9	0 0 0	

<b>Peningkatan pemahaman lembaga dalam perencanaan penangan</b>	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			1	58.0	9	56.1															0	-											0	-	4	56.14	4	0			
<b>gan</b> <b>nggar</b> <b>an</b> <b>respon</b> <b>sive</b> <b>gender</b> <b>(PPRG).</b>	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengar	1 %	1	58.0	9	56.1															0	-											0	-	4	56.14	4	0		Dinsos	
				0	50.0	9	46.0															0	-											0	-	9	6.000	9	0			



	naan peng garan	Kemasy arakatan Kewena ngan Kabupat en/Kota																																										
	res p on si ve gen der (PP RG).	Advokasi Kebijaka n dan Pendamp ingan Peningka tan Partisipa si Perempu an dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organi sasi Masyar akat yang Menda pat Advoka si dan Penda mpinga n Kebijak an Pening katan Partisip asi Perem puan di Bidang Politik, Hukum , Sosial dan Ekono	7 5	or g	1 0 519. 534. 000	9 8	345. 640. 000																	1 0 0	10.0 00.0 00	0 0 0	-							0 0 0	-	4 9	345.6 40.00 0	4 9	0 0 0		Dins os		





		aten/Kota			100	64.108.000	44	46.993.000												100	81.047.200	0	-						0	-	83	46.993.000	83	0	
					100	64.108.000	88	46.993.000												100	33.550.000	0	-						0	-	70	46.993.000	70	0	
	Penanganan perempuan terhadap kekerasan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan	39	100	22.602.000	82	18.135.000												100	17.400.000	0	-						0	-	41	18.135.000	41	0	Dinsos







DAN ANAK.																															
Peni ngk atan perli ndu nga n terh ada p pere mpu an dan ana k.	Pengum pulan, Pengola han Analisis dan Penyajia n Data Gender dan Anak Dalam Kelemba gaan Data di Tingkat Daerah Kabupat en/Kota				1	59.3	1	43.8									1	7.60	0	-					0	-	5	43.88	5	0	
					0	44.0	0	85.0									0	0.00	0	0					0	0	0	5.000	0	0	
	Penyajia n dan Pemanfa atan Data Gender dan Anak dalam Kelemba gaan Data di Kewenan gan	Jumlah Dokum en Penyaji an dan Peman faatan Data Gender dan Anak dalam	2	do k	1	59.3	1	43.8									1	7.60	0	-					0	-	5	43.88	5	0	Dins os
					0	44.0	0	85.0									0	0.00	0	0					0	0	0	5.000	0	0	

		Kabupaten/Kota	Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota																											
		<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>			100	34.769.000	100	82.892.000							100	55.000.000	0	-							0	-	50	82.892.000	50	0
Peningkatan peran terhadap perempuan dan anak.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			100	34.769.000	100	82.892.000								100	55.000.000	0	-						0	-	50	82.892.000	50	0	



		UNGAN KHUSUS ANAK			000	000									800	2	0					2	0		0		2	
	Peni ngk atan perli ndu nga n terh ada p pere mpu an dan ana k.	Pencega han Kekeras an Terhada p Anak yang Melibatk an para Pihak Lingkup Daerah Kabupat en/Kota			1 000.000	9 49.786.000									1 000.000	0 124.600.000	0 -					0 000	0 -	5 0	49.786.000	5 0	0 000	
		Advokasi dan pendamp ingan Perangka t Daerah dalam pelaksan aan kebijaka n / program/ kegiatan pencega han KTA	Jumlah perang kat Daerah yang Menda patkan Advoka si Kebijak an dan Penda mpinga n Pelaks anaan	1 % 1 00	1 000.000	9 49.786.000									1 000.000	0 84.100.000	0 -					0 000	0 -	5 0	49.786.000	5 0	0 000	Dins os



	Peningkatan pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1	%	100.000	83	95.790.000																												Dinsos
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Penga	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Penga	100		100.000	83	95.790.000																												Dinsos	





Pagu Anggaran Dinas Sosial PPPA tahun 2025 sebesar Rp. 21.712.753.754,- dengan realisasi sampai kondisi akhir Maret 2025 sebesar Rp. 5.263.403.490,- atau 24,24% dengan realisasi capaian kinerja triwulan I sebesar 25%.

Realisasi keuangan dan fisik memang masih belum mencapai 35%, namun kegiatan sudah terlaksana sesuai dengan scedul. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan adanya pelaksanaan kegiatan yang cukup besar anggarannya terdapat pada triwulan III dan IV.

Beberapa kegiatan yang anggarannya cukup besar berada pada triwulan ini yaitu :

1. Pembayaran Bansos Pendidikan sebesar Rp.1.016.722.100,- dan Hibah Mushalla dan Masjid sebesar Rp.6.050.000.000,- pada Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial.
2. Pembayaran Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Terlantar sebesar Rp. 739.000.000,-
3. Pembayaran Bantuan Sosial bagi Anak-anak terlantar di luar panti sebesar Rp.300.000.000,-





**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. TANAH DATAR TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								15.848.673.232,00	21.712.753.754,00	19.134.489.101,00	3.285.815.869,00							35.561.419.600,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.952.673.232,00	20.617.093.754,00	18.156.870.101,00	3.204.196.869,00							33.783.419.600,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							14.952.673.232,00	20.617.093.754,00	18.156.870.101,00	3.204.196.869,00							33.783.419.600,00		
1	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.432.099.346,00	4.782.099.346,00	4.517.451.493,00	536.320.254,00							4.968.419.600,00		

1.06.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.0 00,00	30.000.0 00,00	20.250.0 00,00	5.250.000,0 0			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		22.500.0 00,00	DINAS SOSIAL PEMBER DAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1.06.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.0 00,00	20.000.0 00,00	13.000.0 00,00	3.000.000,0 0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			12.500.0 00,00	DINAS SOSIAL PEMBER DAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-					-	-	4.058.09 9.346,00	4.194.24 2.568,00	4.046.29 9.693,00	- 11.799.653,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			4.210.00 0.000,00	DINAS SOSIAL PEMBER DAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>					30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	4.053.09 9.346,00	4.189.24 2.568,00	4.041.29 9.693,00	- 11.799.653,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			4.200.00 0.000,00	DINAS SOSIAL PEMBER DAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

															Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas					
1.06.01.202.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				2 Laporan	2 Laporan	5.000.00 0,00	5.000.00 0,00	5.000.00 0,00	0,00	Kab. Tanah Datar, Sumatera Kerman, Sumatera Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			10.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.06.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.0 00,00	22.000.0 00,00	9.000.00 0,00	1.000.000,0 0			-	Meningk atkan kualitas tata kelola penyelen ggaraan pemerint ah daerah yang bersih, akuntabe l dan berkualit as Meningk atkan kualitas tata kelola penyelen ggaraan pemerint ah daerah yang bersih, akuntabe l dan berkualit as	-		20.000.0 00,00	DINAS SOSIAL PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK
1.06.01.2 .05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
		<i>Jumlah Pegawai Berdasarka n Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				10 Oran g	10 Oran g	10.000.0 00,00	22.000.0 00,00	9.000.00 0,00	1.000.000,0 0	Kab. Tanah Datar, Semu a Keca matan  Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Meningk atkan kualitas tata kelola penyelen ggaraan pemerint ah daerah yang bersih, akuntabe l dan berkualit as			20.000.0 00,00	DINAS SOSIAL PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK

															Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas				
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	95.000.000,00	226.856.778,00	101.740.000,00	6.740.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		259.919.600,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	5 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	- 2.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Sumatera Kecamatan , Sumatera Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			10.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	36.000.000,00	16.000.000,00	- 4.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Sumatera Kecamatan , Sumatera Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			60.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

															Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas					
1.06.01.2	06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	- 7.500.000,00	Kab. Tanah Datar, Sumatera Kerman, Sumatera Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			50.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.06.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan</i>				6 Doku men	6 Doku men	15.000.0 00,00	20.000.0 00,00	7.500.00 0,00	- 7.500.000,0 0	Kab. Tanah Datar, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Meningk atkan kualitas tata kelola penyelen ggaraan pemerint ah daerah yang bersih, akuntabe l dan berkualit as Meningk atkan kualitas tata kelola penyelen ggaraan pemerint ah daerah yang bersih, akuntabe l dan berkualit as			20.000.0 00,00	DINAS SOSIAL PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK
1.06.01.2 .06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				20 Lapor an	20 Lapor an	10.000.0 00,00	20.000.0 00,00	7.740.00 0,00	- 2.260.000,0 0	Kab. Tanah Datar, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Meningk atkan kualitas tata kelola penyelen ggaraan pemerint ah daerah yang bersih, akuntabe l dan			30.000.0 00,00	DINAS SOSIAL PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK

														berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas					
	1.06.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	130.856.778,00	60.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan		89.919.600,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	40 Unit	10.000.0 00,00	10.000.0 00,00	10.000.0 00,00	0,00	Kab. Tanah Datar, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Meningk atkan kualitas tata kelola penyelen ggaraan pemerint ah daerah yang bersih, akuntabe l dan berkualit as Meningk atkan kualitas tata kelola penyelen ggaraan pemerint ah daerah yang bersih, akuntabe l dan berkualit as		25.000.0 00,00	DINAS SOSIAL PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK
1.06.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	-					-	-	79.000.0 00,00	79.000.0 00,00	79.764.4 00,00	764.400,00			-	Meningk atkan kualitas tata kelola penyelen ggaraan pemerint ah daerah yang bersih, akuntabe l dan berkualit as Meningk atkan	-	91.000.0 00,00	DINAS SOSIAL PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK



			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Tanah Datar, Semu a Kecamatan Semu a Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			60.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBER DAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.764.400,00	764.400,00	Kab. Tanah Datar, Semu a Kecamatan Semu a Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			25.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBER DAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

															Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas				
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	165.000.000,00	220.000.000,00	250.397.400,00	85.397.400,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		340.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				14 Unit	14 Unit	100.000.000,00	105.000.000,00	138.397.400,00	38.397.400,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			200.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBER DAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				15 Unit	15 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	12.000.000,00	- 3.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			20.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBER DAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



2	1.06.02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	-				-	-	77.000.000,00	122.000.000,00	64.500.000,00	153.000.000,00						230.000.000,00		
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	77.000.000,00	122.000.000,00	64.500.000,00	-12.500.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			230.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
							14 Orang	14 Orang	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih,			50.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

			Kewenangan Kabupaten/Kota												akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas					
1.06.02.203.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Keluarga	20 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	- 15.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih,			90.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



			<i>Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>				1 Sertifikat	1 Sertifikat	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	- 5.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		20.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	1.06.04	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	-				-	-	<b>9.811.300.386,00</b>	<b>14.942.520.908,00</b>	<b>12.842.445.108,00</b>	<b>17.748.699.614,00</b>						<b>27.560.000.000,00</b>	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-				-	-	1.046.000.000,00	1.046.000.000,00	1.046.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	2.000.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK





1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-				-	-	8.765.300.386,00	13.896.520.908,00	11.796.445.108,00	3.031.144.722,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.560.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>			40 Orang	40 Orang	23.500.000,00	23.500.000,00	11.250.000,00	- 12.250.000,00	Kab. Tanah Datar, Sumatera Kacamatan, Sumatera Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			60.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



	1.06.04.2 .02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatka n Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenanga n Kabupaten/ Kota</i>				200 Oran g	200 Oran g	500.000. 000,00	500.000. 000,00	186.911. 600,00	- 313.088.400 ,00	Kab. Tanah Datar, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DAU YANG DITENT UKAN P ENGGU NAANN YA BIDAN G PENDID IKAN	-	Meningk atkan kualitas tata kelola penyelen ggaraan pemerint ah daerah yang bersih, akuntabe l dan berkualit as Meningk atkan kualitas tata kelola penyelen ggaraan pemerint ah daerah yang bersih, akuntabe l dan berkualit as			500.000. 000,00	DINAS SOSIAL PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK
4	1.06.05	<b>PROGRAM PERLINDU NGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	-				-	-	563.273. 500,00	626.473. 500,00	620.473. 500,00	231.726.500 ,00							795.000. 000,00	
	1.06.05.2 .02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	563.273. 500,00	626.473. 500,00	620.473. 500,00	57.200.000, 00			-	Meningk atkan kualitas tata kelola penyelen ggaraan pemerint ah daerah yang	-		795.000. 000,00	DINAS SOSIAL PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK





			<i>Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>				50 Keluarga	50 Keluarga	63.673.500,00	63.707.100,00	63.707.100,00	33.600,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		70.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5	1.06.06	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	-				-	-	57.000.000,00	114.000.000,00	84.000.000,00	73.000.000,00						130.000.000,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	-				-	-	57.000.000,00	114.000.000,00	84.000.000,00	27.000.000,00			-	Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup Peningk	-	130.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



1.06.07.2 .01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	-				-	-	12.000.000,00	30.000.000,00	28.000.000,00	16.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBER DAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.07.2 .01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
		<i>Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota</i>				2 Makam	2 Makam	12.000.000,00	30.000.000,00	28.000.000,00	16.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			100.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBER DAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	10.000.000,00	60.000.000,00	54.710.000,00	44.710.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBER DAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																			
			<i>Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG</i>				80 Orang	80 Orang	10.000.000,00	60.000.000,00	54.710.000,00	44.710.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			50.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBER DAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

															Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas						
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	6.600.000,00	3.400.000,00	-			-	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	-		300.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																				
			<i>Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum,</i>					60 Orga nisasi	60 Orga nisasi	10.000.000,00	10.000.000,00	6.600.000,00	3.400.000,00	-	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-		Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	300.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

			Sosial dan Ekonomi Kewenanga n Kabupaten/ Kota																	
2.08.02.2 .03	Penguatan dan Pengemban gan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdaya an Perempuan Kewenanga n Kabupaten/ Kota	-					-	-	399.000. 000,00	399.000. 000,00	314.279. 000,00	- 84.721.000, 00			-	Meningk atkan kualitas tata kelola penyelen ggaraan pemerint ah daerah yang bersih, akuntabe l dan berkualit as Meningk atkan kualitas tata kelola penyelen ggaraan pemerint ah daerah yang bersih, akuntabe l dan berkualit as	-		675.000. 000,00	DINAS SOSIAL PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK
2.08.02.2 .03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																			

			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				30 Orang	30 Orang	394.000.000,00	394.000.000,00	309.279.000,00	84.721.000,00	-	Kab. Tanah Datar, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			650.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		Kab. Tanah Datar, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			25.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



			Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	16.150.000,00	16.150.000,00	13.650.000,00	-2.500.000,00	Kab. Tanah Datar, Sumatera Selatan, Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			50.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	-				-	-	48.324.200,00	47.497.200,00	47.497.200,00	-827.000,00			-	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas Sumber Daya	-		60.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

		Kewenangan Kabupaten/Kota													Manusia				
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				10 Orang	10 Orang	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Layanan	1 Layanan	41.324.200,00	40.497.200,00	40.497.200,00	-827.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

															berkualitas					
3	2.08.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	-				-	-	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	42.400.000,00							50.000.000,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota																		

	.01.0002																				
			<i>Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	Kab. Tanah Datar, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas				50.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4	<b>2.08.06</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	-				-	-	<b>10.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>47.720.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>								<b>60.000.000,00</b>	
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	-				-	-	10.000.000,00	55.000.000,00	47.720.000,00	37.720.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih,	-			60.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

		Kabupaten/ Kota													akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas					
2.08.06.2 .02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	55.000.000,00	47.720.000,00	37.720.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih,			60.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



			<i>Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA</i>				39 Orang	39 Orang	83.640.000,00	84.100.000,00	84.100.000,00	460.000,00	Kab. Tanah Datar, Semu a Kecamatan , Semu a Kel/D esa	DAK NON FISIK-DANA PELAY ANAN PE RLINDU NGAN PEREM PUAN DAN ANAK	-	Meningk atkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah ah daerah yang bersih, akuntabe l dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah ah daerah yang bersih, akuntabe l dan berkualitas			90.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK
2.08.07.2 .01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota																			
			<i>jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/k ota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00	40.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Semu a Kecamatan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Meningk atkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah ah daerah yang bersih, akuntabe l dan berkualitas			50.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK

															Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas				
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	223.905.800,00	289.392.800,00	274.542.800,00	50.637.000,00			-	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	-		298.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan</i>			55 Orang	55 Orang	29.750.000,00	99.750.000,00	84.900.000,00	55.150.000,00	Kab. Tanah Datar, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia			98.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		

			Jumlah AMPK yang mendapatka n layanan				30 Laya nan	30 Laya nan	194.155. 800,00	189.642. 800,00	189.642. 800,00	4.513.000,0 0	-	Kab. Tanah Datar, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DAK NON FISIK- DANA PELAY ANAN PE RLINDU NGAN PEREM PUAN DAN ANAK	-	Meningk atkan kualitas tata kelola penyelen ggaraan pemerint ah daerah yang bersih, akuntabe l dan berkualit as Meningk atkan kualitas tata kelola penyelen ggaraan pemerint ah daerah yang bersih, akuntabe l dan berkualit as		200.000. 000,00	DINAS SOSIAL PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK
2.08.07.2 .03	Penguatan dan Pengemban gan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindunga n Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-					-	-	69.020.0 00,00	69.020.0 00,00	69.020.0 00,00	0,00				-	Meningk atkan kualitas tata kelola penyelen ggaraan pemerint ah daerah yang bersih, akuntabe l dan berkualit as Meningk atkan	-	75.000.0 00,00	DINAS SOSIAL PEMBER DAYAAN PEREMP UAN DAN PERLIND UNGAN ANAK



		0	0	0	626,00		0	
--	--	---	---	---	--------	--	---	--

## BAB IV P E N U T U P

Perubahan rencana kerja perangkat daerah Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 ini mengacu pada hasil evaluasi rencana kerja tahun 2025 sampai bulan maret 2025 triwulan I yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan.

Perubahan renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka perangkat daerah termasuk Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 dan bersifat indikatif.

Untuk perhitungan kebutuhan program/ kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan standarisasi harga barang dan jasa yang ada di SIPD yang sudah di update oleh instansi yang berwenang.

Batusangkar, Juni 2025

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN TANAH DATAR



**HELDIYAS, SH**

NIP. 19721202 199903 1 003